

GOOD TOURISM GOVERNANCE PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN SEBAGAI DESA WISATA BEJIJONG KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKERTO

Fransiskus Ari Nugraha^{1*}, Agus Sukristiyanto², dan Muhammad Roisul Basyar³
Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2024
Revised Juni 2024
Accepted Juni 2024
Available online Juni 2024

arifransiskus671@gmail.com,
agussukris@untag-sby.ac.id,
roisulbasyar@untag-sby.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Pemerintah Kabupaten Mojokerto memiliki program untuk melakukan pengembangan sektor pariwisata hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata. Penelitian ini berfokus pada aspek penerapan Good Tourism Governance dalam pengembangan desa wisata. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berbagai peran dan keterlibatan dari sektor pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaannya berpedoman pada prinsip-prinsip Good Tourism Governance. Desa Bejijong sebagai salah satu desa wisata rintisan yang berada di Kabupaten Mojokerto berusaha mengembangkan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia agar menjadi desa wisata yang memiliki karakter

budaya sebagai nilai jual yang dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat Bejijong. Elemen-elemen yang terlibat baik dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto, Desa Bejijong, Lembaga Desa Wisata Bejijong, dan masyarakat memiliki peranan yang saling membutuhkan untuk bersinergi dalam pengembangan desa wisata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sadar akan pentingnya merawat dan mengembangkan desa wisata di Desa Bejijong sebagai satu-satunya desa wisata yang mengusung tema Budaya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala akibat pandemi Covid-19 yang sempat mematikan laju pengembangan desa wisata dan juga adanya beberapa faktor ketidak sinergisan antara pihak pemerintah Desa Bejijong dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mojokerto yang mengakibatkan proses pengembangan desa wisata Bejijong ini menjadi lebih terhambat.

Kata kunci: Good Tourism Governance, Pengembangan Desa Wisata

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa, penyelenggaraan kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan tidak boleh hanya memperhatikan aspek pendapatan dan wisatawan saja, akan tetapi harus memperhatikan daya dukung, kemudian adanya keberadaan dari bidang pariwisata dapat bersinergi terhadap berbagai aktor yang

berperan. Melihat latar belakang keindahan alam dan keberagaman budaya, Negara Indonesia menjadi negara yang cukup terkenal akan hal sektor wisata, baik wisata alam ataupun wisata budaya.

Dalam dunia pariwisata, citra pariwisata sangatlah penting untuk meningkatkan total jumlah wisatawan lokal maupun mancanegara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata (Muslih et al., 2019). Hal ini selaras dengan (Heny Wulandari, Rina Indriani, Rima Untari, 2020) yang mengatakan bahwa pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha, penerimaan devisa, serta pembangunan infrastruktur. Dunia pariwisata di Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan



kesejahteraan masyarakat, mengangkat citra bangsa, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta memperlerat persahabatan antar bangsa. Adanya potensi dan keberagaman destinasi wisata di Indonesia menjadikan sebuah pelopor baru agar wisatawan mancanegara berkunjung ke negeri tercinta. Pada tahun 2022 Negara Indonesia mengalami perkembangan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar 5.889.031. Data ini diperkuat di dalam bagan dari KEMENPAREKRAF pada tahun 2022.

Gambar 1 Jumlah Wisatawan Mancanegara Ke Indonesia Tahun 2022

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemenparekraf/Baparekraf 2022

Berdasarkan grafik diatas, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2022 mengalami perkembangan dan pertumbuhan hingga 278,10% bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang sebesar 1.557.530 kunjungan. Pada grafik diatas juga terdapat perubahan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang semula 5.471.277 menjadi 5.889.031. Tahun 2022 juga menjadi tahun pemulihan pariwisata di Indonesia setelah dihantam Pandemi Covid-19 selama dua tahun. Terdapat tren yang positif ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia dari 1,56 juta kunjungan di tahun 2021 meningkat menjadi 5,89 kunjungan wisatawan mancanegara. Hal ini

juga menjadi momentum kebangkitan pariwisata Indonesia yang didukung dengan adanya berbagai kegiatan internasional, seperti MotoGP 2022 di Mandalika, Word Tourism Day 2022 hingga berbagai rangkaian kegiatan KTT G20. Rangkaian kegiatan KTT G20 telah menjadi cikal bakal kepercayaan wisatawan mancanegara untuk kembali berwisata ke Indonesia. Selain itu, prestasi Indonesia juga menambah nilai positif pariwisata yakni Indonesia menang lima kategori di Word's Best Award 2022, The Greatest Place 2022, dan diakuinya wisata edukasi Geopark Maros Pangkep oleh UNESCO.

Memasuki tahun 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia per bulan Agustus mencapai 1,13 juta kunjungan. Tren peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia sudah terlihat sejak Maret 2022 dan berlanjut hingga Agustus. Jika dilihat secara kumulatif dari Januari hingga Agustus 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 7,44 juta kunjungan. Terdapat kenaikan sebesar 166,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Jumlah ini sudah melewati jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara total di 2022 yang hanya mencapai 5,9 juta kunjungan.

Pengembangan desa wisata merupakan sebuah bukti nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tentang otonomi daerah. Desa wisata di Indonesia pada umumnya identik dengan sumber daya alam yang masih alami, kekhasan desa, serta adanya adat istiadat masyarakat setempat. Terdapat banyak ciri khas pada desa wisata untuk menjadi sebuah identitas desa tersebut melalui aktivitas wisata. Desa wisata juga dapat mendorong warga sekitar perdesaan turut menjaga dan melestarikan potensi alam dan keunikan budaya desa yang ada (Masitah, 2019). Hal tersebut sangat berdampak untuk perkembangan desa wisata yang ada di Provinsi Jawa Timur sekaligus dapat memperkenalkan desa wisata tersebut kepada wisatawan lokal maupun mancanegara sekaligus dapat mendorong perekonomian masyarakat desa. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2032 yang tertera dalam bagian kedua tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran pasal 4 alenia 2 (c) menjelaskan tentang industri pariwisata harus berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam. Dalam perkembangannya jumlah desa wisata yang ada di Jawa Timur sudah sangat meningkat. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah total keseluruhan desa wisata yang terdaftar yaitu 222 desa wisata pada tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dalam hal ini penelitian difokuskan terhadap pengembangan Desa Bejijong agar dapat mendukung program kebijakan tersebut. Desa Bejijong merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto. Desa Bejijong perbatasan sebelah utara dengan Desa Kejagan, sebelah timur dengan Desa Trowulan, sebelah selatan dengan Desa Trowulan, dan sebelah barat dengan Kecamatan Mojoagung (Jombang). Mojokerto sendiri memiliki cerita mengenai Kerajaan Majapahit yang menjadi sumber inspirasi bagi kejayaan masa lalu bagi bangsa Indonesia.

Desa Bejjong memiliki 2 dusun, yaitu Kedungwulan dan Bejjong yang dimana dua dusun tersebut masing-masing memiliki potensi yang dapat mendukung Desa Bejjong untuk mengembangkan desa wisata. Potensi dari Desa Bejjong, antarlain:

- 1) Home Stay
- 2) Pengrajin Batik
- 3) Pengrajin Cor Kuningan
- 4) Situs Siti Inggil
- 5) Candi Brahu
- 6) Patung Buddha Tidur
- 7) Pengrajin Patung

Dengan melihat potensi tersebut maka Pemerintah Desa Bejjong terus berusaha untuk membangun desa berdasarkan pada potensi yang dimiliki oleh Desa Bejjong. Pemerintah Desa Bejjong dengan warga masyarakat telah berkomitmen untuk terus menjaga dan melestarikan budaya serta merawat ke asrian alamnya agar dapat terus menopang kehidupan masyarakat. Pemerintah Desa Bejjong juga melakukan berbagai pelatihan terhadap masyarakat agar mandiri dalam berwirausaha, namun fakta di lapangan banyak masyarakat Desa Bejjong yang masih enggan melaksanakan program tersebut dengan maksimal. Tetapi ada beberapa masyarakat yang sudah sadar mulai menerapkan program yang telah diberikan kepada masyarakat. Desa Bejjong juga telah memiliki berbagai macam industri kreatif yang selama ini menunjang perekonomian warga sekitar, namun dalam praktiknya industri kreatif yang dimiliki di Desa Bejjong tidak saling bersinergi dan terintegrasi. Dimana hal itu dapat dilihat bahwa industri kreatif yang dimiliki belum banyak dikenal oleh khalayak umum terutama diluar Kabupaten Mojokerto sendiri. Permasalahan yang dihadapi di Desa Bejjong ialah pada sumber daya manusianya dimana masyarakat tidak memahami secara baik mengenai media promosi dan pemasaran di dalam media sosial saat ini.

Kondisi masyarakat pada Desa Bejjong juga masih perlu membutuhkan pengembangan diri terutama dalam minat dan bakat di bidang Public Speaking dan kemampuan berbahasa Inggris. Bagaimana masyarakat Desa Bejjong belum mampu menyambut dengan baik para turis mancanegara yang ingin melihat lebih dalam bagaimana adat dan kebudayaan yang kental di desa. Selain itu adanya pembelajaran mengenai Bahasa Inggris sangat diperlukan secara maksimal bagi masyarakat Desa Bejjong untuk menunjang keberhasilan dalam berkomunikasi terhadap turis mancanegara. Kondisi pendidikan formal di Desa Bejjong juga terdapat beberapa kelemahan, diantaranya ada masyarakat yang belum lulus tingkat Sekolah Dasar (SD) dan ada beberapa tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi. Berdasarkan observasi, capaian dari lingkup pendidikan di desa tersebut kurang mengalami peningkatan dikarenakan pengaruh lingkungan dan mindset kedaerahan yang masih kental. Seperti halnya banyak remaja di Desa Bejjong yang lebih memilih untuk bekerja bukan karena kesulitan ekonomi, namun mereka lebih senang menghasilkan suatu berbentuk material (uang).

Kurangnya pengelolaan destinasi wisata dari Desa Bejjong menjadi fokus utama dari pemerintah desa dan kabupaten. Salah satunya ialah destinasi wisata di Desa Bejjong masih perlu dikelola lebih baik agar kebersihan di sekitar lingkup wisata terlihat lebih nyaman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Selain itu keberadaan Homestay di Desa Bejjong kurang terekspos di para wisatawan. Fasilitas umum berupa toilet umum juga sangat minim dalam kebersihannya. Permasalahan



yang paling krusial ialah kurangnya informasi tentang keberadaan desa wisata Bejjong dan berbagai atraksi budaya yang dapat disajikan kepada wisatawan yang menyebabkan lemahnya informasi dari pemerintah desa. Hal ini perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut agar jangkauan tentang desa wisata Bejjong lebih dikenal oleh wisatawan mancanegara dan asing.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dari permasalahan tersebut. Melihat Desa Bejjong memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai desa wisata yang mampu menyajikan atraksi budaya dan alam. Adapun dalam penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan Desa Bejjong sebagai destinasi wisata kepada wisatawan lokal maupun mancanegara yang dimiliki oleh Kabupaten Mojokerto. Peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Bejjong tentang pengembangan desa wisata melalui Good Tourism Governance dan melihat Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019.

2. Tinjauan Pustaka Kebijakan Publik

Setiap Negara memiliki sebuah kebijakan publik atau public policy, sehingga kebijakan ini berupa sebuah aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk memecahkan sebuah masalah yang terjadi di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga pemerintah guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Adapun pendapat dari para ahli mengenai kebijakan publik, menurut James E. Anderson sebagaimana disunting Budi Winarno (2008 : 20-21) kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah, di mana implikasi dari kebijakan tersebut adalah:

- a) Kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau mempunyai tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan
- b) Kebijakan publik berisi tindakan-tindakan pemerintah
- c) Kebijakan publik merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang masih dimaksudkan untuk dilakukan
- d) Kebijakan publik yang diambil bisa bersifat positif dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai segala sesuatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu
- e) Kebijakan pemerintah setidaknya-tidaknya dalam arti yang positif didasarkan pada peraturan perundangan yang bersifat mengikat dan memaksa.

Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Hal itu selaras dengan yang diungkapkan Woll (Tangkilisan 2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian "tindakan" (nyata/bukan suatu kehendak) yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa. Sehingga dapat dikatakan bahwa keunggulan setiap Negara semakin ditentukan oleh kemampuan Negara tersebut dalam mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu prosedur penerapan kebijakan dengan menjalankan suatu kegiatan yang akan menghasilkan sesuatu yang selaras dengan tujuan dan sasaran dari kebijakan. Implementasi pada dasarnya adalah serangkaian proses penerjemahan dari sebuah kebijakan yang diubah menjadi aksi atau tindakan dari para implementor yang harus dilakukan secara konsisten dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dalam isi kebijakan tersebut (Mulyadi, 2015).

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2014:139) menyatakan implementasi kebijakan merupakan Langkah-langkah yang dijalankan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang ditujukan guna terlaksananya tujuan seperti yang ditetapkan pada keputusan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan tidak akan bisa dimulai apabila tujuan dan sasarannya belum ditetapkan. Teori implementasi kebijakan ini memiliki 6 variabel yang berakibat atas kesuksesan implementasi kebijakan yang meliputi:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan menjadi variabel utama dari proses analisis penerapan kebijakan. Kinerja dari implementasi kebijakan bisa diidentifikasi tingkat kesuksesannya apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut jelas dan mudah dipahami oleh pelaksana kebijakan.
- 2) Sumber daya merupakan bagian vital guna memastikan kesuksesan dalam proses penerapan kebijakan yang terdiri dari sumber daya manusia dan non manusia. Kesuksesan penerapan kebijakan mengandalkan pada kemampuan pelaksana dalam mengelola sumber daya yang ada.
- 3) Komunikasi antar organisasi. Suatu implementasi dapat berjalan secara efektif bilamana dalam ukuran dan tujuan kebijakan mudah dimengerti pelaksana kebijakan. Komunikasi menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan karena informasi yang jelas akan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan.
- 4) Disposisi implementor yang terkait dengan sikap atau kecenderungan pelaksana kebijakan yang menyangkut 3 hal penting yaitu, respon, kognisi, dan intensitas disposisi implementor.
- 5) Karakteristik agen pelaksana yang berkaitan dengan adanya dukungan dari implementor kepada suatu kebijakan. Karakter yang ditunjukkan dalam implementasi kebijakan dapat berupa dukungan atau penolakan dari berbagai pihak.
- 6) Kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik ialah kondisi yang berasal dari pihak internal dan eksternal yang ikut mendorong dalam proses implementasi kebijakan. Sehingga akan mengetahui sejauh mana mereka mendukung kebijakan tersebut.

Pembangunan

Menurut Suryono tinjauan terhadap konsep pembangunan dapat dikaji dari dua aspek penting yakni : secara etimologik dan secara ensiklopedik. Secara

etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. Kata bangun setidaknya mengandung 4 arti :

- a) Bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi)
- b) Bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku)
- c) Bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi)
- d) Bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk).

Secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogkan dengan konsep : pertumbuhan (growth), rekonstruksi (reconstruction), modernisasi (modernization), westernisasi (westernization), perubahan sosial (social change), pembebasan (liberation), pembaharuan (innovation), pembangunan bangsa (nation building), pembangunan nasional (national development), pembangunan (development), pengembangan (progress/developing), dan pembinaan (construction).

Desa Wisata

Pemahaman awal mengenai konsep kepariwisataan tidak bisa dilepaskan dari terminologi dari kata wisata, pariwisata dan kepariwisataan. Sebagaimana tercatum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dijelaskan bahwa :

- 1) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 2) Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
- 3) Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Menurut (Antara & Arida, 2015) yang dikutip dari Joshi (2012) Desa Wisata (rural Tourism)

merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur - unsur yang unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan. Baiquni (2005) juga menyatakan bahwa satu hal penting yang diabaikan dalam pengembangan desa wisata adalah persoalan kapasitas kelembagaan pengelola desa wisata. Pendekatan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan lokal (pemerintah daerah dan masyarakat) memiliki spektrum konsep dan pendekatan yang bervariasi. Terdapat lima aspek dan pendekatan yang perlu diperhatikan dalam pengembangan suatu desa wisata, yaitu holistic approach, participatory learning, empowerment of management, action research, dan synergy and network, yang masing-masing aspek tersebut dijelaskan seperti berikut (Antara & Arida, 2015).

- a. Holistic Approach

Pendekatan ini melihat secara menyeluruh dimensi pembangunan atau secara holistik. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan berbagai elemen atau sektor pembangunan secara terpadu, sehingga perumusan masalah dan pemecahannya diselenggarakan secara kolektif dan partisipatif (Antara & Arida, 2015).

b. Participatory Learning

Pendampingan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan lokal perlu dilakukan secara partisipatif, menggali bersama kebutuhan dan merumuskan prioritas penanganan dalam proses 'belajar bersama'. Sesungguhnya yang paling tahu persoalan adalah pelaku lokal (masyarakat dan pemerintah daerah) sendiri, bukan konsultan atau kontraktor pembangunan yang berasal dari luar yang memiliki kepentingannya sendiri. Peran konsultan pada penguatan proses memfasilitasi pembelajaran kolektif, sehingga pemahaman permasalahan akan lebih baik dan solusinya dapat dikerjakan bersama-sama sesuai fungsi masing-masing lembaga dalam tata manajemen (Antara & Arida, 2015).

c. Empowerment of Management

Dalam proses belajar akan menimbulkan pencerahan (enlightment) dan penguatan atau pemberdayaan (empowerment). Kelembagaan yang kuat terdiri dari para pelakunya yang juga tercerahkan dalam belajar dan bekerja. Manajemen kelembagaan yang terus membangun pencerahan dan pemberdayaan akan memberikan perbaikan kinerja dalam pengembangan desa wisata (Antara & Arida, 2015)

d. Action Research

Riset aksi merupakan bagian yang saling melengkapi dalam pendampingan peningkatan kapasitas kelembagaan. Metode riset aksi dilakukan melalui proses pembelajaran dapat diperkaya dengan pengalaman lapangan (Antara & Arida, 2015).

e. Synergy and Network

Sinergi dan jejaring merupakan upaya untuk mewujudkan tugas dan menjawab tantangan pembangunan secara bersama, menciptakan keseimbangan Chek and Balance, dan membangun Trust diantara pelaku pembangunan desa wisata (Antara & Arida, 2015).

Good Tourism Governance

Pariwisata adalah sektor kegiatan yang melibatkan banyak keterkaitan antar berbagai jenis pelaku dan pelaku intervensi dalam produksi barang dan jasa yang dikonsumsi pengunjung. Dalam kerangka ini, fungsi pemerintah sangat relevan dalam mengkoordinasikan upaya untuk membantu memastikan dinamika pertumbuhan permanen yang dicapai pariwisata secara ekonomi, sosial dan lingkungan berkelanjutan. Hal tersebut dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pembangunan di desa wisata. Sementara produksi pariwisata dapat dianalisis dan diteliti berdasarkan hubungan kolaboratif antara sektor publik, swasta, dan penghuni tujuan wisata yang dipandang sebagai sektor kegiatan. Pariwisata mencakup kenyataan yang jauh lebih kompleks karena sifat tanggung jawab yang tersebar untuk pengembangan, dibagi sebab mereka berada di sepanjang jaringan aktor yang luas dan rumit seperti yang digambarkan dalam rincian berikut:

1) Sektor Swasta

Sebagai penghasil utama dan pemasok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh pengunjung, terdiri dari beragam unit ekonomi yang ditentukan sebagai fungsi dari ukuran dan jangkauannya (usaha mikro, kecil, menengah dan besar, baik lokal, regional, nasional atau transnasional) yang terdiri dari berbagai bidang kegiatan produktif mulai dari manufaktur, perdagangan, transportasi hingga berbagai macam layanan (perhotelan, makanan dan minuman, kegiatan budaya dan rekreasi, dll.), memberikan karakter yang agak fragmentaris ke sektor pariwisata.

2) Sektor publik

Peran dasarnya berdasarkan fungsi sehubungan dengan berbagai bidang kegiatan yang secara meyakinkan mempengaruhi bagaimana pariwisata dikembangkan di suatu negara atau wilayah (pengembangan infrastruktur, perencanaan, kebijakan transportasi, masalah fiskal, pekerjaan, dll.) Juga ditandai oleh keragaman pelaku dan agen yang berdampak. Eksistensi semacam itu terjadi dalam dua dimensi: secara horizontal, yaitu dalam hal legislatif (parlemen, kongres) atau cabang eksekutif, umumnya melalui lebih dari satu kementerian atau departemen, instansi, dan lain-lain. Masing-masing dapat memiliki tanggung jawab untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata pada saat yang sama. Secara vertikal, mengingat berbagai tingkat pemerintahan (lokal, regional, provinsi, nasional, dll) yang ada di negara yang ditentukan, tergantung pada bentuk organisasi teritorial yang bersangkutan.

Dengan cara ini pariwisata dari perspektif publik melintasi berbagai bidang pengalaman dan batas administrasi sehingga pada akhirnya dapat dikaitkan dengan hampir semua hal. Dalam prakteknya situasi ini menghasilkan apa yang bisa disebut kelemahan tertentu dalam struktur pemerintahan untuk koordinasi dan kerjasama yang efektif, baik di sektor publik maupun berhadapan dengan pelaku dan agen pariwisata. Hal ini juga dapat membuat sulit untuk mendapatkan gambaran yang lengkap untuk tujuan perencanaan dan pengelolaan tujuan secara lestari serta memaksimalkan manfaat aktivitas.

3) Masyarakat

Masyarakat yang menghuni sekitar tujuan wisata berperan sebagai aktor kunci dalam mengelola destinasi wisata yang berada di wilayah mereka. Namun, penelitian empiris telah menemukan bahwa ini lebih sering berbentuk industri gabungan daripada membantu merancang dan menerapkan mekanisme partisipasi publik yang luas, membatasi intervensi dan kontribusi sosial yang berorientasi pada perencanaan dan pengelolaan tujuan ini (Duran, 2013 h.12).

Dalam Good Tourism Governance memiliki persamaan dengan Good Governance dan sektor pariwisata. Menurut (Hidayati, 2018) yang dikutip dari Bambang Sunaryo (2013) prinsip dari penyelenggaraan tata kelola kepariwisataan yang baik ini pada intinya adalah adanya koordinasi dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan yang ada serta pelibatan partisipasi aktif yang sinergis (terpadu dan saling menguatkan) antara pihak pemerintah, swasta atau industri pariwisata, dan masyarakat setempat yang terkait. Good governance merupakan arah baru administrasi publik yang dalam dekade sekarang cenderung mengedepankan konsep tersebut dalam mengelola berbagai kepentingan dan urusan

publik melalui berbagai keputusan publik dengan melibatkan lebih banyak petaruh diluar aktor (Hidayati, 2018). Dalam penyelenggaraan prinsip Good Tourism Governance menurut Bambang Sunaryo (2013) menyebutkan ada beberapa prinsip dalam mengenali sektor pariwisata berbasis Good Tourism Governance, yaitu:

Prinsip	Deskripsi
Partisipasi masyarakat terkait	Masyarakat harus mengawasi atau mengontrol pembangunan kepariwisataan yang ada dengan ikut terlibat dalam menentukan visi, misi dan tujuan pembangunan kepariwisataan kemudian masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan program-program yang sudah disusun sebelumnya.
Keterlibatan segenap pemangku terkait	Para pelaku dan pemangku kepentingan yang harus terlibat secara aktif dan produktif dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
Kemitraan kepemilikan lokal	Pembangunan kepariwisataan harus mampu memberikan kesempatan lapangan usaha yang luas untuk masyarakat setempat.
Pemanfaatan sumber daya secara berlanjut	Pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan penggunaan sumber daya yang ada.
Mengakomodasikan aspirasi masyarakat	Aspirasi dan tujuan masyarakat harus diperhatikan guna mewujudkan hubungan yang harmonis antara pengunjung/ wisatawan dengan masyarakat sekitar.
Daya dukung lingkungan	Daya dukung lingkungan dalam pembangunan kepariwisataan yang harus dipertimbangkan dan dijadikan pertimbangan utama dalam mengembangkan berbagai fasilitas dan kegiatan kepariwisataan meliputi daya dukung fisik, biotik, social-ekonomi dan budaya.
Monitor dan evaluasi program	Kegiatan monitor dan evaluasi dalam program pembangunan kepariwisataan yang berlanjut mencakup mulai dari kegiatan penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata sampai dengan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keseluruhan kegiatan.
Akuntabilitas lingkungan	Perencanaan pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan komponen-komponen lingkungan yang saling berkaitan.
Pelatihan pada masyarakat terkait	Pelatihan pada masyarakat diperlukan guna mengimplementasikan program-program yang sudah dibuat.



Promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan	Pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lanskap dan identitas budaya masyarakat setempat secara baik.
---	--

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif. Metode ini dipilih untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Sehingga penelitian ini yang berjudul Good Tourism Governance Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Sebagai Desa Wisata Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto menggunakan sebuah metode penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu rangkaian yang berbentuk susunan permasalahan yang dijelaskan sebagai pusat atau pokok pembahasan di dalam suatu topik penelitian (Salmaa, 2022). Dalam penelitian ini memberikan fokus pada aspek penerapan prinsip Good Tourism Governance dalam pengembangan desa wisata, hal ini dapat diketahui berbagai peran dan keterlibatan dari sektor pemerintahan, pihak swasta, dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini memberikan fokus pada aspek penerapan prinsip-prinsip Good Tourism Governance dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong yang dalam hal ini akan diketahui peran dan keterlibatan antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Bejijong yang pelaksanaannya berpedoman pada penerapan prinsip-prinsip good tourism governance menurut Bambang Sunaryo (2013:78), yakni:

1. Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan
2. Pelatihan Pada Masyarakat Terkait
3. Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Lokasi Penelitian

peneliti menentukan lokasi penelitian yang berlokasi di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur. Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena, Desa Bejijong memiliki keberagaman atraksi budaya dan potensi peninggalan kebudayaan Kerajaan Majapahit

Sumber Data

Sumber data menurut Siyoto (2015:28) Data primer adalah data yang diperoleh dari responden atau informan melalui kuesioner, observasi atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pendapat para ahli serta informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan sebagai data awal untuk mendukung data primer. Data yang diperoleh dapat berasal dari dokumen yang ada di lokasi penelitian, jurnal, artikel ataupun dari sumber literatur lain.



Teknik Analisis Data

Wiliam Wiersma (1986) dikutip dari (Sugiyono, 2017:273) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari beberapa waktu. Triangulasi Sumber adalah Mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan kebenarannya. Triangulasi Teknik artinya peneliti membandingkan data dari sumber yang sama, tetapi menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, untuk menguji keandalan data. Triangulasi Waktu artinya melakukan pengujian validitas data dengan melakukan wawancara, observasi, atau prosedur lain pada waktu yang berbeda, untuk melihat konsistensi data.

4. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang diterapkan oleh para aktor yang terlibat dalam pengembangan Desa Bejjong menjadi desa wisata rintisan yang banyak diminati oleh para wisatawan dengan tujuan untuk mempelajari hal-hal dan pengetahuan mengenai budaya-budaya Majapahit serta kebudayaan asli Desa Bejjong. Selain itu penelitian ini dilakukan guna melihat apakah penerapan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang rencana induk pengembangan kepariwisataan sebagai Desa Wisata Bejjong dapat berjalan dengan baik. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *Good Tourism Governance* dari Bambang Sunaryo yang dalam mengetahui keberhasilannya dari beberapa penerapan prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* dalam pengembangan desa wisata di Desa Bejjong dengan menggunakan tiga indikator pencapaian yang akan dijabarkan dibawah ini:

Keterlibatan Segenap Pemangku Kepentingan

Pada konsep teori Bambang Sunaryo Tahun 2013 menyebutkan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam mengembangkan desa wisata perlu adanya keterlibatan dari beberapa aktor. Tanpa adanya dukungan dan peranan dari beberapa aktor mustahil rasanya akan mewujudkan tata kelola kepariwisataan yang baik dan tidak akan berhasil untuk menciptakan desa wisata yang unggul. Berikut keterlibatan pemangku kepentingan yang membantu dalam pengembangan Desa Wisata Bejjong, yaitu Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto; Pemerintahan Desa Bejjong; Lembaga Desa Wisata (LADEWI/POKDARWIS); Masyarakat Desa Bejjong. Keterlibatan Pemerintahan Desa Bejjong dan LADEWI sendiri ditujukan dengan adanya pembuatan SK yang diberikan langsung oleh Kepala Desa Bejjong dan dihadiri oleh beberapa pihak terkait mengenai pengadaan pelatihan pengembangan sumber daya manusia untuk menyiapkan masyarakat yang siap dan berkompeten. Peranan dari LADEWI untuk membantu Pemerintah Desa Bejjong untuk melakukan kegiatan promosi kepada masyarakat sekitar agar lebih sadar mengenal desa wisata. Selain itu juga peran LADEWI sendiri melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat desa melalui pendekatan secara perlahan dari orang per orang. Pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan berbagai macam yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata sehingga pemahaman tentang desa wisata dapat diterima oleh masyarakat Desa Bejjong. Peranan LADEWI yang paling utama ialah meningkatkan kualitas pariwisata dari berbagai sektor dan daya jual produk objek wisata guna menjaga kestabilan perekonomian serta sosial masyarakat Desa Bejjong.



Sedangkan pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto menunjukkan partisipasinya dalam program pengembangan Desa Wisata dengan merencanakan program peningkatan pemanfaatan teknologi informasi terkait pemasaran pariwisata yang fokus dalam pengelolaan website dalam dokumen rencana kerja DISBUDPORAPAR 2024, adanya perjanjian atau MOU dengan Pemerintahan Desa Bejijong terkait pelaksanaan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan masyarakat desa mengenai pengembangan desa wisata. Namun sangat disayangkan bahwa pelatihan yang telah diadakan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan dan kegiatan mengenai monitoring hingga pada tahap evaluasi program tidak berjalan secara optimal. Pada sudut pandang masyarakat, keterlibatan ini diperlihatkan dengan adanya partisipasi dari UMKM dalam program pelatihan yang diadakan oleh para tenaga profesional yang hanya berfokus pada persiapan penyedia sumber daya manusia UMKM menuju pengembangan Desa Bejijong di sektor pariwisata.

Secara umum masyarakat desa belum memiliki kesadaran dan pengetahuan yang maksimal terkait desa wisata, sehingga dalam kegiatan yang telah diadakan oleh pemerintahan desa partisipasinya masih kurang dalam proses pengembangan desa. Pada pengembangan Desa Wisata Rintisan Bejijong, pemangku kepentingan yakni Pemerintahan Desa dan LADEWI telah menunjukkan keterlibatan secara aktif, sedangkan dalam Masyarakat Desa dan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto masih kurang terlihat dalam proses pengembangan desa wisata. Jika dilihat dan dihubungkan fakta lapangan dengan teori yang digunakan bahwa kegiatan pengembangan Desa Wisata Bejijong tidak semua pemangku kepentingan (stakeholder) memiliki sinergitas dan keterlibatan elemen satu dengan yang lain. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator ini belum diterapkan secara maksimal dalam proses pengembangan Desa Wisata Bejijong.

Pelatihan Pada Masyarakat Terkait

Pada teori Bambang Sunaryo Tahun 2013 menyebutkan bahwa pelatihan pada masyarakat sangat diperlukan guna mengimplementasikan program-program yang telah di buat. Desa Bejijong merupakan sebuah Desa Wisata Rintisan yang sangat membutuhkan sebuah edukasi dalam meningkatkan kualitas dan pengetahuan masyarakatnya. Pemerintahan Desa Bejijong dan LADEWI sudah mengupayakan pengadaan pelatihan dengan menghadirkan UPT BLK Provinsi Jawa Timur dan bekerjasama juga dengan pelaku wisata yang lainnya. Kegiatan ini dilakukan selama satu bulan penuh dengan setiap minggunya 2 kali pertemuan dihari sabtu dan minggu. Pelatihan dan pendampingan pada masyarakat desa, pihak Pemerintahan Desa Bejijong melakukan kerjasama dengan Pihak Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto untuk membuat pelatihan dan pendampingan di setiap bulannya. Mulai dari pelatihan kepada para pelaku UMKM yang membahas mengenai administrasi UMKM, perizinan UMKM, promosi UMKM melalui sosial media yang ada (Instagram, Tik Tok, Shopee, Tokopedia, Facebook, dan masih banyak lagi), pelatihan berkomunikasi dengan menggunakan Bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Pelatihan yang ditujukan untuk UMKM memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM dan nantinya juga Desa Bejijong merasakan kedatangan para wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin berkunjung ke Desa Wisata Bejijong.



Pengelolaan pengembangan pada sektor pariwisata menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan dalam proses pengembangan desa wisata juga perlu dilakukan secara partisipatif guna menggali bersama kebutuhan desa dan dapat merumuskan prioritas yang diperlukan untuk pengembangan Desa Bejjong. Peran dari lembaga atau kelompok civitas akademika pada pemberian materi dalam kegiatan pelatihan ini ialah untuk penguatan masyarakat desa dalam proses pelatihan sehingga pemahaman masyarakat Desa Bejjong mengenai permasalahan dalam pengembangan desa wisata dapat di evaluasi secara bertahap dan mendapatkan sebuah solusi yang nantinya dapat dikerjakan secara bersama-sama sesuai dengan bidangnya masing-masing pengelola desa wisata serta para pelaku UMKM yang ada di Desa Bejjong.

Banyak pelatihan yang telah di lakukan terhadap masyarakat Desa Bejjong, namun pelatihan yang mengenai pemandu wisata belum dirasakan secara penuh oleh masyarakat Desa. Hal ini dapat dilihat bagaimana Desa Bejjong masih belum memiliki pemandu wisata yang benar-benar resmi mendapatkan surat keputusan dari pihak pemerintah desa. Jadi selama ini yang menjadi pemandu wisata ialah masyarakat desa yang ditunjuk secara acak oleh pihak LADEWI Desa Bejjong, terkadang juga pihak Pemerintahan Desa menyewa orang dari luar masyarakat Desa Bejjong. Masih banyak pelatihan yang belum diberikan dan dirasakan oleh warga desa untuk proses pengembangan Desa Bejjong dibuktikan bahwa sasaran dari indikator pelatihan pada masyarakat terkait belum sepenuhnya tercapai dengan maksimal. Serta pelatihan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang seharusnya menjadi fokus utama dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto masih belum dirasakan oleh masyarakat Desa Bejjong. Jika dilihat dan dihubungkan fakta lapangan dengan teori yang digunakan bahwa hal ini sangat berbanding terbalik dengan proses pelatihan yang seharusnya terus dilaksanakan dengan tetap bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan desa wisata di Desa Bejjong agar menumbuhkan pencerahan yang baru dan penguatan dalam pemberdayaan.

Promosi dan Advokasi Nilai Budaya Kelokalan

Pada konsep teori Bambang Sunaryo Tahun 2013 mengatakan bahwa pembangunan kepariwisataan secara berlanjut juga membutuhkan program-program promosi dan advokasi penggunaan lahan serta kegiatan yang memperkuat karakter identitas budaya masyarakat setempat secara baik. Pengembangan Desa Wisata Bejjong yang termasuk dalam wisata rintisan sangat memerlukan langkah promosi yang lebih gencar, hal ini dilakukan oleh pihak Pemerintahan Desa bersama dengan LADEWI untuk memfokuskan lebih dahulu untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui beberapa kegiatan kemasyarakatan seperti hal nya arisan, acara karang taruna kumpul-kumpul, pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan bagi tugas kepada masing-masing RT untuk membantu mengkordinir langkah awal sosialisasi kepada warganya terkait program desa wisata. Kegiatan promosi yang telah dilakukan oleh POKDARWIS untuk memperkenalkan Desa Wisata Bejjong ini berupa kepemilikan sosial media mulai dari Instagram, You Tube, dan website.

Dalam kegiatan promosi, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto berperan membuka jalan selebar-lebarnya bagi desa wisata yang ingin dibantu. Jadi dalam hal ini perwakilan desa boleh datang



langsung ke kantor dinas untuk berdiskusi terkait langkah promosi yang diambil dan bantuan apa yang bisa di optimalkan. Selain itu pihak dinas juga memiliki inisiatif sendiri dengan selalu melakukan promosi kegiatan wisata ketika mengikuti rapat atau seminar pelatihan melalui foto-foto dan video terbaik. Dengan adanya promosi ini nantinya diharapkan produk-produk yang menjadi potensi Desa Bejjong dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bejjong. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto juga sering mengundang perwakilan pelaku wisata sebagai delegasi desa wisata dalam kegiatan pelatihan maupun ketika zoom mengenai pengembangan desa wisata baik pada tingkat kabupaten atau provinsi yang mana masyarakat desa merasa di libatkan.

Langkah promosi ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan Desa Wisata Bejjong, tetapi juga bermanfaat terhadap para pelaku UMKM yang secara tidak langsung ketika banyak wisatawan yang datang berkunjung ke desa maka akan melakukan transaksi jual beli terkait produk unggulan yang dijual. Hal ini juga selaras dengan konsep teori Sapta Pesona yang didalamnya terdapat beberapa unsur yang dapat mewujudkan Desa Wisata, yaitu kenangan yang diberikan oleh obyek wisata (destinasi wisata) kepada para wisatawan yang berkunjung ke Desa Bejjong. Pada proses pengembangan Desa Bejjong, promosi dan advokasi nilai budaya kelokalan masih diperlukan usaha yang konsisten serta serius untuk mewujudkan desa wisata. Tidak hanya dari segi peningkatan sumber daya manusianya saja, tetapi juga dilihat bagaimana strategi promosinya mengingat Desa Bejjong sebagai Desa Rintisan yang memiliki potensi yang indah dari nilai budaya yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Bejjong. Jika dilihat dan dihubungkan fakta lapangan dengan teori yang digunakan dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan Desa Wisata Bejjong dalam instrumen promosi sudah berjalan dengan secara baik, semua aktor banyak terlibat dalam beberapa aspek terutama aspek promosi sudah berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian di atas mengenai *Good Tourism Governance* Pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Sebagai Desa Wisata Bejjong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto dapat diketahui bahwa pengembangan desa wisata rintisan Bejjong bisa menjadi desa wisata yang memiliki nilai budaya sebagai destinasi pilihan para wisatawan dengan menerapkan beberapa prinsip-prinsip *Good Tourism Governance* yaitu melibatkan pemangku kepentingan, memberikan pelatihan dan pendampingan pada masyarakat terkait guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta juga melakukan promosi dan advokasi bagi nilai budaya kelokalan. Prinsip-prinsip penerapan *Good Tourism Governance* dapat peneliti simpulkan dibawah ini.

Dalam pengembangan desa wisata terdapat keterlibatan dari pihak pemangku kepentingan khususnya di Desa Bejjong menuju desa wisata rintisan yang maju. Keterlibatan para pemangku kepentingan ini mulai dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Mojokerto; Pemerintahan Desa Bejjong; dan LADEWI Desa Bejjong. Ketiga para aktor ini saling bersinergi dengan perannya masing-masing, mereka melakukan keterlibatannya dengan cukup maksimal mulai dari proses perencanaan, pembinaan, serta bagaimana alur pengajuan bantuan bagi

desa wisata yang ingin maju. Namun terdapat beberapa kendala dalam segi pendataan para wisatawan dari masing-masing desa termasuk Desa Bejijong. Hal ini terjadi setelah masa pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia dan berakibat pada pengembangan desa wisata. Selain itu pihak Desa Bejijong tidak melaporkan kepada pihak dinas yang berakibatkan bias atau bahkan tidak dimikinya data base yang konkrit terkait daftar pengunjung wisatawan yang datang. Akan tetapi pihak dinas kedepannya akan melakukan monitoring pada saat rapat koordinasi atau pembinaan desa agar mengetahui desa mana saja yang masih berjalan dan bisa dikembangkan secara optimal.

Proses pengembangan desa wisata yang ada di Desa Bejijong juga harus ditunjang dengan kesiapan sumber daya manusia untuk menyambut desa wisata. Masyarakat desa harus bisa memilih dan memilah hal-hal apa saja yang dapat mendukung terwujudnya Desa Wisata Bejijong, maka dari itu pelatihan dan pembinaan menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan serta dirasakan oleh masyarakat Desa Bejijong. Oleh karena itu terdapat pelatihan dan pendampingan pada masyarakat terkait. Beberapa upaya sudah pernah dilakukan dengan mengambil salah satu sebagai delegasi masyarakat desa atau para pelaku wisata dalam kegiatan pelatihan baik kerjasama dengan pihak dinas, kelompok desa wisata yang sudah terampil sampai mendatangkan parah ahli. Langkah lainnya yang di ikuti ialah dengan mengikuti pendampingan secara daring dan pelatihan tentang kepariwisataan seperti yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.

Promosi yang dilakukan oleh Desa Bejijong melalui website dan secara online. Nama Desa Bejijong juga sudah tercatat pada website resmi kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif Republik Indonesia. Dalam website jadesta, Desa Bejijong termasuk dalam kategori desa wisata rintisan. Kategori ini termasuk dalam golongan kategori dengan jumlah desa wisata terbanyak, yaitu sekitar 4.673 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah promosi ini juga memiliki manfaat tidak hanya dalam pengembangan desa wisata, tetapi juga berdampak bagi para pelaku UMKM yang secara tidak langsung ketika banyak para wisatawan yang datang berkunjung maka akan melakukan transaksi jual beli terhadap produk-produk unggulan yang mereka jual. Hal ini sangat berpengaruh signifikan pada peningkatan perekonomian Desa Bejijong sendiri. Selain itu pihak LADEWI Desa Bejijong memiliki anggota khusus yang membidangi tentang promosi. Desa Bejijong juga memiliki media sosial berupa Instagram yang dapat dilihat oleh para wisatawan yang hendak akan berkunjung ke Desa Bejijong. Dengan nama Account instagram @bejijongku terdapat berbagai informasi mengenai potensi atraksi budaya dari Desa Bejijong dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Desa Bejijong. Selain itu di Bio Instagram juga terdapat linkr.ee yang didalamnya berisi informasi mengenai brosur paket wisata Bejijong, e-book Desa Wisata Bejijong, website resmi Desa Bejijong, serta Tik Tok Desa Bejijong.

Daftar Referensi

Anggara, S., & Sumantri, I. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*.

Antara, M., & Arida, N. S. (2015). *Panduan pengelolaan desa wisata berbasis potensi lokal*. Konsorium Riset Pariwisata Universitas Udayana, 23.
https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir

Jejaring Desa Wisata. (2021). Pesona Indonesia.
<https://jadesta.kememparekraf.go.id/home>

Puspaningtyas, A., Pramesti, T., Lady Rara P., I., & Octaviani, M. (2021).

Menggagas Desa Wisata Plunturan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. PEDULI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat, 4(2), 59–69.
<https://doi.org/10.37303/peduli.v4i2.210>

Muslih, M., Dedi Rianto Rahadi, & Marbun, S. (2019). GOOD TOURISM GOVERNANCE TERINTEGRASI: SUATU PEMIKIRAN KEDEPAN. 1–27.

Hidayati, N. (2018). Pengembangan Kawasan Wisata Tlatar Di Kabupaten Boyolali Dalam Perspektif

Good Tourism Governance. In Skripsi Administrasi Publik.

Jejaring Desa Wisata. (2021). Pesona Indonesia.
<https://jadesta.kememparekraf.go.id/home> Joey. (2009). Teori dan Konsep

Pariwisata. <http://konsep-pariwisata.blogspot.com/2009/04/sapta-pesona.html>

Junaid, I., & M. Salim, M. A. (2019). Peran Organisasi Tata Kelola Dalam Pengelolaan Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta. PUSAKA (Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Business Event), 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.33649/pusaka.v1i1.6>

Muslih, M., Dedi Rianto Rahadi, & Marbun, S. (2019). GOOD TOURISM GOVERNANCE TERINTEGRASI : SUATU PEMIKIRAN KEDEPAN. 1–27.

Pratama, Y. I. (2016). Konsep Pengembangan Kawasan Pariwisata Terpadu Di Kecamatan Batu Kota Batu. Tesis, Ra 142551, 1–275.

Ditamei, S. (2022). Jenis Teknik Pengumpulan Data beserta Pengertian dan Contohnya. 28 Juli 2022. [https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya#:~:text=Teknik pengumpulan data adalah metode,data yang sesuai dan tepat.](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6202830/jenis-teknik-pengumpulan-data-beserta-pengertian-dan-contohnya#:~:text=Teknik%20pengumpulan%20data%20adalah%20metode,data%20yang%20sesuai%20dan%20tepat.)

Edukasinfom. (2020). Macam-macam Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif. 17 September 2020.
<https://www.edukasinfo.com/2020/09/macam-macam-sumber-dan-teknik.html>.

Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi. 8(1), 21.
<https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.